



BUPATIBANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.480.009.393.605,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp576.586.461.048,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.600.543.608,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.786.222.572,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp7.474.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
 - b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp8.325.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp11.750.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp8.810.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak Pameran Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
 - e. Pajak Pertandingan Olahraga Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp56.400.000.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp60.125.000.000,00 (enam puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.753.500.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.600.543.608,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh), terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.492.081.358,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp228.150.906.189,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.151.382.044,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.769.030.625,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp0,00 (nol rupiah).
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp12.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.340.462.250,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.673.795.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp187.173.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp50.032.244.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.070.550.250,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah); dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp19.692.694.868,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta); dan
 - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp7.786.222.572,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp465.686.151,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. hasil sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar Rp437.686.151,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.897.422.932.557,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.639.371.620.615,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.482.427.516.615,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp28.929.328.615,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);
 - b. Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.000.093.363.000,00 (satu triliun sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp125.075.667.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp328.329.158.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp125.046.646.000,00 (seratus dua puluh lima miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp31.897.458.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.051.311.942,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp205.035.343.392,00 (dua ratus lima miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp53.015.968.550,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.010.146.435,00 (dua triliun enam ratus tiga belas miliar sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.538.434.369,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.534.509.888,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.386.209.032,00 (delapan ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.905.515.449,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.712.200.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.534.509.888,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp667.781.640.171,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Gaji Pokok ASN Rp512.050.550.489,00 (lima ratus dua belas miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp41.431.761.372,00 (empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp 7.460.043.462,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp37.106.015.554,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam juta lima belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp 7.352.711.250,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 24.588.871.732,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.631.008.189,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp14.129.023,00 (empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp26.847.145.737,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.072.028.581,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.165.231.944,00 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.062.142.838,00 (tiga miliar enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp131.589.566.715,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp 85.696.734.715,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp 1.251.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp 44.641.732.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp178.383.370.202,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp12.850.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp141.700.207.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp2.566.397.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp 14.795.121.202,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);
 - e. Belanja Honorarium Rp 6.388.365.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp83.280.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 24.438.928.592,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp1 10.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.705.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.616.273.392,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp417.690.000,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp29.833.595.755,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.228.451.193,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.386.209.032,00 (delapan ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.464.705.706,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis Rp 135.873.885.073,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. belanja barang tak habis pakai Rp 1.442.677.059,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah); dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.148.143.574,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.127.613.962,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp215.049.175.305,00 (dua ratus lima belas miliar empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp28.196.524.546,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp1.978.859.611,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp7.152.247.500,00 (tujuh miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.332.850.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp67.350.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp4.085.300.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp7.443.650.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp407.055.000,00 (empat ratus tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);

- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp254.580.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp12.160.022.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.498.842.320,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.938.638.100,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp8.104.530.203,00 (delapan miliar seratus empat juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp8.455.674.017,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp47.113.194.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.503.297.500,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp10.969.410.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.533.887.500,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.627.475.440,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.628.436.100,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp205.422.644.004,00 (dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.905.515.449,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.284.777.600,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp31.333.077.600,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp951.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.658.424.449,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp56.160.090.600,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.418.750.000,00 (lima miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.712.200.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.177.200.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.535.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp283.610.250.008,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 22

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp61.703.348.718,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp1.133.992.860,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.607.693.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.604.693.000,00 (tiga miliar enam ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp507.324.720,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp83.230.460,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp35.833.260,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp388.261.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp33.475.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.672.856.108,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp2.763.473.708,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.909.082.400,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.452.695.756,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp280.200.256,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp22.172.495.500,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.811.625.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp60.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp300.875.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.460.387.760,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp1.975.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp485.137.760,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp110.180.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp246.985.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- c. Belanja Modal Alat Pelindung Rp185.575.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Alat SAR Rp61.410.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp40.861.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp17.288.029.859,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.989.692.655,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp62.519.112.605,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp62.316.712.605,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp151.230.149.739,00 (seratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi; dan
 - Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.311.202.602,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua ribu enam ratus dua rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan Rp76.533.659.009,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan rupiah); dan
 - Belanja Modal Jembatan Rp1.777.543.593,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.312.661.637,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.634.588.896,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.562.332.927,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp11.115.739.814,00 (sebelas miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.341.915.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp3.826.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp22.635.015.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah); dan
 - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp5.880.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.264.370.500,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp1.246.850.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Jaringan Listrik Rp13.017.520.500,00 (tiga belas miliar tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp8.057.638.946,00 (delapan miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp200.650.000,00 (dua ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.806.988.946,00 (tujuh miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp23.166.266.839,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp341.695.195.219,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.969.160.219,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp30.456.991.909,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp4.512.168.310,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.726.035.000,00 (tiga ratus enam miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp306.627.035.000,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

- Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp133.000.752.830,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp157.700.752.830,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.700.752.830,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp24.700.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp133.000.752.830,00) (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp133.000.752.830,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 76



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor: 76 Tahun 2023
Tanggal: 29 Desember 2023

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576.586.461.048,00
4.1.01	Pajak Daerah	257.000.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	7.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	7.474.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	7.474.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	26.000.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	26.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	29.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.325.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.325.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.750.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.750.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	115.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	115.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.810.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	8.810.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	525.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	525.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	137.000.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	137.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	320.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	320.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.700.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.875.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.875.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	575.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	575.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	56.400.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	56.400.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	56.400.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	280.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	280.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	280.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	140.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	140.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	140.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.125.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	60.125.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	60.125.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97.753.500.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	97.753.500.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	97.753.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	291.600.543.608,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	235.492.081.358,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	228.150.906.189,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	54.950.168.337,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	172.850.737.852,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.151.382.044,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.151.382.044,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.769.030.625,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	162.057.021,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.045.800.753,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.561.172.851,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000,00
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	112.200.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.000.000,00
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	53.340.462.250,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.673.795.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.491.990.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	161.555.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.250.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	86.700.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	86.700.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	187.173.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	187.173.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.032.244.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.032.244.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.070.550.250,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	659.605.250,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	80.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	281.250.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	49.695.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	563.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	563.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.199.694.868,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.692.694.868,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.692.694.868,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.786.222.572,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.012.036.421,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	907.036.421,00
4.1.04.01.02.0029	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	667.036.421,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	240.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	105.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	465.686.151,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	28.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	28.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	437.686.151,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	437.686.151,00
4.1.04.05	Jasa Giro	275.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.500.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	14.000.000,00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	2.000.000,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	4.500.000,00
4.1.04.13.01.0027	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.897.422.932.557,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.639.371.620.615,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.482.427.516.615,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	28.929.328.615,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	19.971.309.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	2.114.235.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.863.841.615,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	809.628.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	128.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	23.299.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.146.888.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.093.363.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.000.093.363.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.075.667.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.603.589.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.322.140.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.480.795.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.700.000.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	770.500.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.490.000.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.000.834.000,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	7.374.871.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.017.196.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	215.250.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	535.500.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.688.899.000,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	977.522.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.799.955.000,00
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	3.892.292.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	53.206.324.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	328.329.158.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	101.277.870.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.480.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	141.700.207.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.566.397.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.110.010.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.862.680.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.631.908.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.431.682.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.762.435.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	791.376.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.323.825.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	674.185.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	503.581.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.693.002.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	125.046.646.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	125.046.646.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	125.046.646.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	31.897.458.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	31.897.458.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	31.897.458.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	258.051.311.942,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	205.035.343.392,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	205.035.343.392,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	67.347.648.426,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.383.071.298,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.599.836.600,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	88.964.405,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.615.822.663,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	53.015.968.550,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	53.015.968.550,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	53.015.968.550,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.480.009.393.605,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.964.538.434.369,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.049.534.509.888,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	667.781.640.171,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	512.050.550.489,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	469.442.590.508,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.607.959.981,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.431.761.372,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.834.462.412,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.597.298.960,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.460.043.462,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.460.043.462,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.106.015.554,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.882.285.554,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.223.730.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.352.711.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.352.711.250,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.588.871.732,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.604.153.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.984.718.732,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.631.008.189,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.407.272.551,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	223.735.638,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.129.023,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.347.825,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.781.198,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	26.847.145.737,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	24.680.138.551,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.167.007.186,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.072.028.581,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	969.795.461,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	102.233.120,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.165.231.944,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.858.567.115,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	306.664.829,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.062.142.838,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.835.129.635,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	227.013.203,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	131.589.566.715,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	85.696.734.715,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	84.230.934.715,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.465.800.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.251.100.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.251.100.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	44.641.732.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	44.641.732.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.383.370.202,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.850.000.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	375.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.450.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	50.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	185.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.820.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	14.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	55.000.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.006.250.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.887.675.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	141.700.207.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	141.700.207.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.566.397.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.566.397.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.795.121.202,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.795.121.202,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.388.365.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.706.390.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	681.975.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	83.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	83.280.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.438.928.592,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.705.200.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.705.200.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.616.273.392,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.611.824,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.512.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	417.690.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	417.690.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.837.260,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.319.260,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.319.260,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.726.720,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.726.720,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	16.228.451.193,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	16.228.451.193,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	16.228.451.193,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.386.209.032,00
5.1.02.01	Belanja Barang	138.464.705.706,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	135.873.885.073,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.758.001.666,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.104.080.070,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.121.151.402,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.537.756.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	63.150.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	184.499.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	314.674.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.837.588.555,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	859.955.368,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	143.952.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	64.087.900,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	42.575.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.907.150,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.430.634.137,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.206.070.577,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.766.126.752,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	324.566.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.329.937.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.636.664.512,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.586.274.499,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.500.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	27.815.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.023.480.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.551.249.810,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.484.057.236,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	859.203.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.182.622.480,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.847.150.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	340.290.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	421.385.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	395.385.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	13.715.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.374.346.625,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.370.360.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	362.410.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.839.956.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.989.862.934,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	168.300.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	143.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	156.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	436.500.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	256.650.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	27.020.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	395.475.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	336.300.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	242.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.101.100.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.442.677.059,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.439.395.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.282.059,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.148.143.574,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.020.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.537.800,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	75.000.000,00
5.1.02.01.04.0447	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	46.560.000,00
5.1.02.01.04.0492	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	16.390.000,00
5.1.02.01.04.0563	Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	7.000.000,00
5.1.02.01.04.0699	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.01.04.0704	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	824.635.774,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	278.127.613.962,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	215.049.175.305,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.744.210.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.601.050.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	65.860.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	41.200.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.576.560.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	670.250.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	35.991.365.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.481.761.748,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	404.682.620,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.510.366.637,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	125.750.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.043.169.619,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	811.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	694.580.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	558.548.676,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	860.124.204,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.068.950.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.597.043.854,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.325.744.076,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.050.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.079.951.798,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.342.695.283,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	159.585.336,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.770.522.674,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	320.045.832,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	322.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	961.150.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	6.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.515.217.668,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.825.525.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.460.480.280,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	34.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	36.800.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	180.055.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.078.570.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	35.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.276.900.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	498.650.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	791.750.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	41.120.500.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	236.075.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.708.450.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	57.500.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	885.050.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.631.215.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.080.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	170.770.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	21.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.196.524.546,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.880.275.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.972.384.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.500.004.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.368.910.160,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	249.708.484,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225.242.102,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.978.859.611,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	597.937.369,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	392.130.054,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	654.664.156,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	233.128.032,00
5.1.02.02.03.0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	101.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.152.247.500,00
5.1.02.02.04.0001	Belanja Sewa Tractor	1.200.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	193.944.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.499.400.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	224.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	212.600.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	121.607.500,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	50.200.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.026.790.000,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.930.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.979.825.000,00
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	199.600.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	59.000.000,00
5.1.02.02.04.0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	507.800.000,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	51.660.000,00
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	16.050.000,00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	3.300.000,00
5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	131.416.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	657.425.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	166.000.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.332.850.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	28.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	25.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.244.350.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
5.1.02.02.06.0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	67.350.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	65.350.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.085.300.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	978.900.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	286.500.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	846.400.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	146.500.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	2.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	725.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	1.000.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.443.650.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	25.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	90.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan	510.000.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	20.200.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	280.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.265.650.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.252.800.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	407.055.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	407.055.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	254.580.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	254.580.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.160.022.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.705.791.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.029.270.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	348.900.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.076.061.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.498.842.320,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.938.638.100,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	94.475.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	21.960.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	850.920.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.296.790.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	402.292.500,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.310.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	208.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	72.500.000,00
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.095.860.600,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	239.070.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	219.915.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	30.250.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	121.000.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	250.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	76.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	223.560.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	89.790.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	215.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	107.445.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.104.530.203,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.450.376.948,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	171.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	2.392.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	11.153.255,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.455.674.017,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.986.974.650,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	12.654.400,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	202.529.800,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	502.270.400,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	60.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.691.244.767,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.113.194.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.113.194.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.749.684.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.363.510.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.503.297.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.969.410.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Pertobatan	3.728.400.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.025.010.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.216.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.533.887.500,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.533.887.500,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.627.475.440,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.627.475.440,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.627.475.440,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.628.436.100,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.628.436.100,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.628.436.100,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	205.422.644.004,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	205.422.644.004,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	205.422.644.004,00
5.1.05	Belanja Hibah	103.905.515.449,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.284.777.600,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.333.077.600,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.333.077.600,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	951.700.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	951.700.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.658.424.449,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56.160.090.600,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.024.199.200,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.135.891.400,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.418.750.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.055.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.363.750.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.770.583.849,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.770.583.849,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	250.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	250.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.712.200.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.177.200.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.177.200.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.177.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.535.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.535.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.535.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	283.610.250.008,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.703.348.718,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.133.992.860,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.133.992.860,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	990.650.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	131.992.860,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	1.000.000,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	10.350.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.607.693.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.604.693.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	225.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	979.222.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.471.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	335.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.030.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	507.324.720,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	83.230.460,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	45.950.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.893.660,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.116.880,00
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	7.603.500,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	21.312.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	3.354.420,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	35.833.260,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	19.214.100,00
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	4.218.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.504.160,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	230.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	5.835.000,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.460.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.872.000,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	500.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	388.261.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.000.000,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	6.500.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	22.799.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	7.380.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	346.581.400,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	33.475.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	33.475.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.875.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	10.600.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	14.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.672.856.108,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.763.473.708,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	414.990.708,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.348.483.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.909.082.400,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.162.970.000,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.500.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	88.900.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	485.250.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	31.800.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	378.922.400,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	758.740.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	300.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	294.400.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	208.800.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	146.050.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	62.750.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	85.600.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	85.600.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.452.695.756,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	280.200.256,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	260.860.256,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.000.000,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	13.500.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.840.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	22.172.495.500,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	22.172.495.500,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.811.625.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.350.000.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	950.000.000,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	400.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	100.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	60.750.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	60.750.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodnamica	300.875.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	300.875.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.460.387.760,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.975.250.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	222.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.753.250.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	485.137.760,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	3.400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	204.237.760,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	220.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	57.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	110.180.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	110.180.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	110.180.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	246.985.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	185.575.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	30.375.000,00
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	4.000.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	36.950.000,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	800.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	113.450.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	61.410.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	61.410.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	52.500.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	52.500.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	52.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	650.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	650.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	650.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.861.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.861.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	39.700.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.161.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.288.029.859,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.288.029.859,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.288.029.859,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.989.692.655,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.989.692.655,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.989.692.655,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.519.112.605,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.316.712.605,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.316.712.605,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.915.514.340,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	172.124.064,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	15.422.897.011,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.364.717.981,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.090.675.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	7.186.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	109.591.162,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.019.193.047,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.400.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	47.400.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	47.400.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	155.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	155.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	155.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.230.149.739,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	78.311.202.602,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	76.533.659.009,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	74.199.633.964,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.106.632.600,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	227.392.445,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.777.543.593,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.777.543.593,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.312.661.637,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.634.588.896,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.327.931.056,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	4.705.634.105,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	601.023.735,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.562.332.927,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.562.332.927,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	11.115.739.814,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	10.930.739.814,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	185.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	32.341.915.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.826.900.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.826.900.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	22.635.015.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	13.930.015.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	8.705.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	5.880.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	5.880.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.264.370.500,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.246.850.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.037.750.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	209.100.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	13.017.520.500,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	13.017.520.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.057.638.946,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.650.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.650.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	200.650.000,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.806.988.946,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.806.988.946,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.806.988.946,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.166.266.839,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.166.266.839,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	23.166.266.839,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	23.166.266.839,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	23.166.266.839,00
5.4	BELANJA TRANSFER	341.695.195.219,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	34.969.160.219,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	30.456.991.909,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	30.456.991.909,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	30.456.991.909,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.512.168.310,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.512.168.310,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.512.168.310,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	306.726.035.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	99.000.000,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	99.000.000,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	99.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	306.627.035.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	306.627.035.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	102.126.560.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	102.084.590.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	102.415.885.000,00
	Jumlah Belanja	2.613.010.146.435,00
	Total Surplus/(Defisit)	-133.000.752.830,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	157.700.752.830,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	156.700.752.830,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	156.700.752.830,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	156.700.752.830,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	156.700.752.830,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.700.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	23.700.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	23.700.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	23.700.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.700.000.000,00
	Pembiayaan Netto	133.000.752.830,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Ka. Bantul, 29 Desember 2023

Bupati



ABDUL HALIM MUSLIH